RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HT

Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : Penilikan Ke-1

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
1.	Ir Suhardi	Internal	Auditor PHPL bid. Prasyarat dan VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Auditor PHPL bid. Produksi
3.	DR. Ir. M. Taufan Tirkaamiana, MP	Internal	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Ir Wasis Kuncoro	Internal	Auditor PHPL bid. Sosial

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
1.	Ir Kurnia, IPU	Internal	Ketua
2.	Ir Rudy Setyawan	Internal	Anggota

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Swadaya Perkasa
b. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan
c. Jenis Izin Usaha : PHPL pada IUPHHK-HT
d. SK IUPHHK-HT : No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011
e. Luas Areal IUPHHK-HT : 17.925 Hektar
f. Lokasi : Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : bakatsukses@ymail.com
h. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Eddy Sanusi
- Komisaris : Ieneka Santoso
i. *Management Representatif* : Sutono

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 18 Juli 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Imon, S.Hut, MP jabatan Plt. Kasubbag Umum. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan KSBTU.
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting Basecamp PT Swadaya Perkasa, 19 Juli 2019	Ketua Tim Audit menyampaikan/ mengkonfirmasi persetujuan hal-hal yang terkait dengan instrument audit, antara lain meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Basecamp dan Areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa, 19 – 22 Juli 2019	Personil auditor sesuai ruang lingkup auditnya melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting Basecamp PT Swadaya Perkasa, 23 Juli 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 24 Juli 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar jabatan Kasi Pengelolaan HH, Pemasaran dan PNBP. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan KSBTU.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 14 Agustus 2019	a. PT Swadaya Perkasa dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan predikat **SEDANG** (74,24%) tanpa verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK. b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Swadaya Perkasa dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya (SEDANG).

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Swadaya Perkasa lengkap yaitu : - SK. Menteri Kehutanan No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; Terdapat lampiran Peta skala 1 : 50.000 atas areal seluas ± 17.925 Ha. - Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap dan realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SWP telah mencapai temu gelang sepanjang 105.681,79 m dengan dokumen BAP Tata Batas sebagai berikut : • BAP Batas Sendiri/Persekutuan Areal kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Dengan IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I)di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2016 (berdasarkan Instruksi Kerja No. 48/ITK/BPKH. IV-2/2016) sepanjang 85.195,07 meter. • BAP Batas Sendiri/Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya PerkasaDengan IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 09 Oktober 2017 (berdasarkan Instruksi Kerja No. INS.44/BPKH.IV/PKH/PLA. 2.0/07/2017) sepanjang 20.485,72 meter. - Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian, Akte Perubahan, NIB dan NPWP tersedia dengan Susunan Pengurus sebagai berikut : a. Komisaris: Ieneke Santoso b. Direktur : Eddy Sanusi
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT SWP telah mencapai temu gelang sepanjang **105.681,79 meter** telah direalisasikan 100 % atau sudah temu gelang sesuai dengan 2 (dua) dokumen Berita Acara Penataan Batas (BATB).

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Dokumen draft Laporan Tata Batas Temu Gelang dari Konsultan Pelaksana Tata Batas PT Swadaya Perkasa (PT Fodec Khatulistiwa) telah disampaikan kepada instansi terkait, sesuai Surat PT Fodec Khatulitiwa Nomor 1820/Fodec/A/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda tentang Penyerahan Draft Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit I. Areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa belum dikukuhkan dengan SK Penetapan.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT SWP masih terdapat konflik lahan berupa okupasi dan klaim lahan oleh masyarakat dan overlapping izin perkabunan. Sesuai hasil overlapping Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa (Lampiran SK IUPHHK-HT No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011) dengan Peta Areal Kerja Perkebunan PT Jabontara Eka Karsa (Lampiran Peta SK. Menteri Kehutanan Nomor : 643/Kpts-II/95) maka diketahui bahwa terdapat lokasi tumpang tindih antara areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Jabontara Eka Karsa seluas ± 400 Ha. Namun demikian berdasarkan hasil pengukuran batas dan realisasi tata batas temu gelang PT Swadaya Perkasa diketahui bahwa pada lokasi overlapping tersebut terdapat areal yang dikeluarkan karena sudah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 182,79 Ha. Dengan demikian masih terdapat overlapping areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan Perkebunan kelapa sawit PT Jabontara Eka Karsa yang masuk ke kawasan hutan di Blok II dari PT Swadaya Perkasa seluas ± 217,21 Ha, sehingga terdapat indikasi potensi konflik batas areal kerja dengan PT Jabontara Eka Karsa seluas 217,21 Ha (400 Ha – 182,79 Ha). Di samping itu Pada Blok II terdapat masalah penguasaan lahan (okupasi) oleh masyarakat Desa Batu Putih sesuai dokumen Berita Acara Kegiatan Pendataan Penguasaan Lahan oleh Masyarakat Desa Batu Putih di Areal Konsesi Blok II Jalan Jabaontara PT Swadaya Perkasa yang dibuat oleh Asisten PMDH dan mengetahui Site Manager, jumlah warga Desa Batu Putih yang menguasasi lahan sepanjang kiri kanan jalan produksi dari KM 10 – KM 17 yaitu 46 orang dengan luas lahan garapan 2 – 4 Ha per orang, dan terdapat Peta Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat Desa Batu Putih Dari KM 10 – KM 17 PT Swadaya Perkasa Site Batu Putih, Skala 1 : 50.000.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Upaya perusahaan menyelesaikan konflik batas wilayah adat (ulayat) dan okupasi masyarakat terus dilakukan oleh PT Swadaya Perkasa dan terdapat beberapa BAP kesepakatan dan perjanjian dengan masyarakat berkaitan dengan proses penyelesaian okupasi lahannya.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	Sedang	Hasil overlapping Peta Areal Kerja PT Swadaya Perkasa dengan Peta Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (lampiran SK. 278/Men-lhk/Setjen/PLA.2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017), maka diketahui pada Blok II (± 7.303 Ha) terdapat perubahan fungsi kawasan HP (Hutan Produksi) menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) seluas ± 1.727 Ha Atas perubahan fungsi kawasan tersebut, PT Swadaya Perkasa pada tahun 2018 membuat usulan revisi RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Swadaya Perkasa Nomor : 031/SP-HTI/JKT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Permohonan Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun an. PT Swadaya Perkasa Kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Namun demikian terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh PT Swadaya Perkasa di antaranya berkaitan dengan citra satelit, perubahan lokasi tanaman kehidupan dan tanaman unggulan serta rencana penggantian jenis tanaman sehingga sampai dengan dilakukan penilikan ke-1 kinerja PHPL Permohonan Revisi RKUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Periode 2012-2021 masih dalam proses penyusunan kembali.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan di luar IUPHHK-HTI pada areal PT Swadaya Perkasa yaitu adanya tumpeng tindih dengan perkebunan PT Jabontara Eka Karsa seluas 2017,21 Ha dan okupasi lahan oleh warga masyarakat sekitar yang sudah dijadikan perkebunan, perladangan, pemukiman dan usaha rumah burung walet. Masalah overlapping dengan areal kelapa sawit PT Jabontara Eka Karsa seluas ± 217,21 Ha dan penguasaan lahan masyarakat Batu Putih di sepanjang jalan KM 10 – KM 17 secara keseluruhan sudah dilakukan pendataan, namun hingga penilikan ke-1 kinerja PHPL dilakukan belum dilaporkan oleh auditee (PT Swadaya Perkasa) sesuai dengan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/18) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	CD	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT SWP Nomor : 002/SP-HTI/DIR-SK/II/2017 tanggal 6 Februari 2017. Visi dan misi PT SWP telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	CD	Sedang	Dokumen Visi dan Misi PT Swadaya Perkasa telah disosialisasikan kepada karyawan dengan menempelkan dokumen visi dan misi PT Swadaya Perkasa di papan pengumuman di tempat yang strategis, seperti di kantor, di halaman kantor, di nursery, kantin dan sebagainya. Selama periode penilikan ke-1 tidak terdapat bukti adanya sosialisasi kepada masyarakat/kampung di sekitar/di dalam areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, pencapaian target masih rendah baik target produksi kayu maupun target pembangunan tanaman HTI. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan khususnya masih banyaknya klaim lahan pada areal PT SWP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/12) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan telah sepenuhnya tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas <25.000</th><th>PT SWP 17.925 Ha</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Canhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nenhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Binhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PKB-R</td><td>2</td><td>3</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>6</td><td>7</td><td>Memenuhi</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT SWP selama 1 tahun terakhir (2018-2019) telah terealisasi sebesar 100,00% yaitu :
- Tahun 2018 Rencana 9 Realisasi 9 (100%)
- Tahun 2019 Rencana 10 Realisasi 2 sampai dengan bulan Juli 2019,
- Rencana Diklat dengan bulan Juli sebesar 2 orang dan telah terealisasi seluruhnya, sedangkan sisanya 8 orang direncanakan pada bulan Oktober dan Desember sesuai dengan jadwal penilaian kinerja Ganis PHPL dan Penyegaran Ganis PHPL dari BPHP Wilayah XI Samarinda)</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT Swadaya Perkasa telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT SWP telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp tersedia cukup lengkap dan telah diimplementasikan kepada karyawan seperti kebebasan berserikat, PP, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, BPJS, jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(15/15) x 100% = 100,00 %</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BAIK (3)</td></tr>
</table>

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Swadaya Perkasa telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT SWP No. 016/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2019 Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	CD	Sedang	PT Swadaya Perkasa telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM Bascecamp namun sangat terbatas dan kondisi jaringan internet yang kurang lancar. Terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT SWP. Petugas yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem informasi manajemen di PT Swadaya Perkasa telah ditunjuk Sdr. Dimas Margianto Kurniawan dengan Jabatan Asisten FIM (Forest Informasi Management) sesuai dengan SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 001.b/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017. Job description untuk penanggungjawab FIM tidak menyampaikan tugas dan tanggungjawab yang jelas terkait dengan penggunaan peralatan dan personil yang melaksanakannya sehingga peralatan tidak berfungsi optimal. Di samping itu kondisi jaringan V-sat yang lambat dan sering mengalami kendala khususnya dalam menjalankan operasional SIPUHH Online menjadikan fungsi system manajemen informasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masih belum dipergunakan untuk keperluan yang lebih luas
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Jabatan SPI ditunjuk oleh Direktur sesuai dengan SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 001.c/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Sistem Pengawasan Internal (SPI) PHPL IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan personil sebagai berikut :

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Penanggungjawab : Bowo Sudaryanto (Kuasa Direksi) Ketua Pemeriksa : Wiryadi Lukman Anggota : 1. Aspek Prasyarat : Roby Alfadani 2. Aspek Produksi : Novita A Sitorus 3. Aspek Ekologi : Ovi Anggraini S. 4. Aspek Sosial : Hari Sapto 5. Aspek VLK : Wibowo A. Pardede Hasil verifikasi laporan SPI pada periode II tauhun 2019 terlihat bahwa kegiatan internal audit PT SWP belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di mana pada tahun 2018 terdapat produksi yang masih menjadi stok sampai dengan tahun 2019, dan realisasi kegiatan produksi kayu dan penyiapan lahan serta kegiatan penanaman masih jauh dari target. Kegiatan monitoring dan evaluasi masih belum menyentuh permasalahan utama pembangunan HTI yaitu tercapainya pembuatan tanaman HTI (Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman). Hal-hal yang masih menghambat pencapaian target RKT yang sangat rendah masih belum dijangkau oleh evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh SPI
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	CD	Sedang	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur PT Swadaya Perkasa atas hasil audit. Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian lain masih belum ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen tindak lanjut yang telah disusun. Dokumen tindak lanjut tidak disertai dengan bukti adanya tindak lanjut telah dilakukan serta tata waktu dan personil yang bertanggungjawab (PIC) pada masing-masing kegiatan yang harus ditindaklanjuti
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Secara umum pelaksanaan RKT PT Swadaya Perkasa tahun 2019 telah disetujui dan disosialisasikan pada sebagian masyarakat sekitar yang terkena dampak dengan adanya BAP Sosialisasi PT Swadaya Perkasa dengan Masyarakat Desa Dumaring dan Desa Cepuak terkait RKT 2019 di Desa Dumaring tanggal 15 Maret 2019. Terdapat foto dokumentasi dan BAP yang ditandatangani oleh Site Manager dan General Manager, namun tidak terdapat daftar hadir; Sedangkan untuk Desa Tembudan, Batu Putih dan Lobang Kelatak tidak terdapat bukti pelaksanaan sosialisasinya. Bahwa RKTUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak-masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode RKT 2019.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Baik	Proses tata batas PT SWP telah temu gelang dan terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak. Terdapat penandatanganan persetujuan pada dokumen BAP Tata Batas yang telah dilaksanakan dari para pihak yaitu pihak pemerintah pusat diwakili oleh BPKH Wilayah IV, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Pemerintah Kecamatan talisayan dan Kecamatan Batu Putih dan perwakilan dari Desa yang berbatasan yaitu Desa Batu Putih, Desa Lobang Kelatak, Desa Tembudan, Desa Dumaring, dan Desa Capuak dengan IUPHHK-HT PT SWP serta dari perwakilan perusahaan yang berbatasan langsung.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	PT SWP telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat tidak terbatas pada pemberian bantuan, namun juga pada program lainnya seperti peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendidikan masyarakat dan lain-lain Secara umum pelaksanaan CD/CSR PT Swadaya Perkasa setiap tahunnya telah disetujui dan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			disosialisasikan dengan adanya persetujuan pelaksanaan RKT setiap tahunnya, namun demikian persetujuan dari masyarakat dan desa sekitar yang menjadi sasaran pelaksanaan kelola sosial masih belum terdapat bukti persetujuannya. Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan sesuai dengan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2019 sesuai dengan BAP sosialisasi RKT 2019 tanggal 15 Maret 2019 terhadap masyarakat Desa Dumaring dan Desa Cepuak. Bahwa RKTUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu PT SWP juga telah menyusun dokumen Rencana Kelola Sosial tahun 2019. Namun kegiatan kelola sosial hanya disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada sebagian masyarakat pada periode tahun 2019.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	CD	Sedang	PT SWP telah menetapkan keberadaan kawasan lidung sesuai dengan SK Direktur PT SWP Nomor 001.a/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 dengan luasan Kawasan lindung sebesar 2.154 Ha terdiri dari : a. Lereng > 15 % seluas 46 Ha b. Sempadan Sungai seluas 1.050 Ha c. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 103 Ha d. KPPN seluas 465 Ha e. KPSL seluas 490 Ha Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT SWP yaitu Desa Batu Putih, Desa Lobang Kelatak, Desa Tembudan, Desa Dumaring dan Desa Cepuak, namun demikian pada BAP tersebut tidak terdapat daftar hadir dan hanya ditandatangani oleh pihak perusahaan saja
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang (*manajemen plan*) yaitu RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2012 – 2021 dan lampiran peta skala 1:50.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 52/VI-BUHT/2012 tanggal 1 Agustus 2012. • Wawancara dengan *Manajemen Representatif* diketahui bahwa PT Swadaya Perkasa tidak mendapat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HTI.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	PT Swadaya Perkasa telah melaksanakan Penataan Areal Kerja pada periode audit, dengan kondisi sebagai berikut : - RKTUPHHK-HT Tahun 2018 implementasi PAK pada Blok III dan IV, sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di II. - RKTUPHHK-HT Tahun 2019 implementasi PAK pada Blok III dan IV, sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di III. • Implemetansi PAK PT Swadaya Perkasa seluruhnya berada pada Blok RKUPHHK-HTI yang disahkan, meskipun belum seluruh lokasinya sesuai dengan rencana penataan areal kerja jangka panjang.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	CD	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan Lapangan secara sampling dapat diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan batas petak/ compartemen dilapangan dengan kondisi : - Plang RKUPHHK-HT Tahun 2019 berupa Plang Blok Tebangan RKT 2019 di Petak TP.III.5 pada koordinat $1^0$21’35,21” N $118^0$10’53,95” E terlihat jelas di lapangan. - Plang RKUPHHK-HT Tahun 2019 berupa Plang Blok Tebangan RKT 2019 di Petak TP.IV.4 pada koordinat $1^0$24’52,30” N $118^0$10’55,43” E terlihat jelas di lapangan. - Plang Batas Petak TP.IV.4/TP.IV.05 pada koordinat $1^0$24’24,68” N $118^0$10’32,96” E, tulisan kurang terlihat jelas di lapangan.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				- Plang Batas Petak TP.IV.5/TP.IV.06 pada koordinat $1^0$24'15,37" N $118^0$10'21,11" E, tulisan kurang terlihat jelas di lapangan. - Plang Batas Petak TP.IV.6/TP.IV.11 pada koordinat $1^0$23'57,95" N $118^0$10'00,3" E, tulisan terlihat jelas di lapangan. - Plang Batas Petak TP.III.8/TP.III.5 pada koordinat $1^0$21'36,37" N $118^0$10'32,34" E, tulisan terlihat jelas di lapangan. - Plang Batas Petak TP.III.17/TP.III.20 pada koordinat $1^0$21'44,27" N $118^0$09'28,82" E, tulisan terlihat jelas di lapangan. - Plang Batas Petak TP.III.21/TP.III.26 pada koordinat $1^0$21'13,37" N $118^0$08'56,71" E, tulisan terlihat jelas di lapangan. Sesuai uraian diatas, Tanda batas blok dan petak/ compartemen belum seluruhnya dapat terlihat dengan jelas di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/15) 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	Terdapat data potensi berdasarkan Data Survei Delmik didapatkan data potensi sebagai berikut : - Potensi standing stock yang dapat dimanfaatkan untuk pohon dengan diameter 40 cm up adalah sebanyak 13,26 pohon/ha dan 20,33 m3/ha. - Potensi standing stock yang dapat dimanfaatkan untuk pohon dengan diameter 20-39 cm adalah sebanyak 14,78 pohon/ha dan 6,93 m3/ha. Terdapat data potensi 3 tahun terakhir berdasarkan rekapitulasi LHC Kayu Alam untuk penyiapan lahan dan telah tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018, dan 2019, dengan kondisi : a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 rata-rata

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				potensi tegakan total yaitu diameter 10 cm up sebanyak 54,83 m3/ha dengan diameter 50 cm up sebanyak 12,24 m3/Ha. b. RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 rata-rata potensi tegakan total yaitu diameter 10 cm up sebanyak 33,55 m3/ha dengan diameter 50 cm up sebanyak 15,89 m3/Ha. c. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 rata-rata potensi tegakan total yaitu diameter 10 cm up sebanyak 36,56 m3/ha dengan diameter 50 cm up sebanyak 16,27 m3/Ha. • Terdapat peta rencana ITSP yang menunjukkan jalur cruising skala 1 : 10.000.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Buruk	PT Swadaya Perkasa memiliki SOP Permanent Sample Plot (PSP) dengan nomor dokumen No. SOP-PRN-007 tgl. 02 Oktober 2017. Terdapat berita acara Pembuatan PUP Plot I di Petak TP.IV.4 pada koordinat 01024'29,07'' N 1180¬10'41,19" E dan dapat diverifikasi penandaan pengukuran pertama dilapangan. Namun demikian, belum dapat diverifikasi nilai riap tegakan.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	Pada periode penilaian tidak terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan dan riap tegakan serta belum didapatkan bukti pelaporan terkait PSP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Sistem Silvikultur yang digunakan dalam pengelolaan hutan PT Swadaya Perkasa berdasarkan berdasarkan RKUPHHK-HT Periode 2012 s.d. 2021 adalah THPB dan TPTI. Dapat diverifikasi keberadaan SOP Tahapan Sistem Silvikultur, diantaranya : - SOP Penataan Areal Kerja, nomor : SOP-PRN-003 tanggal 15 September 2017 - SOP Inventarisasi Hutan, nomor : SOP-PRN-005 Rev. 1 tanggal 21 Juni 2019 - SOP PWH, nomor : SOP-PRN-004 tanggal 22 September 2017 - SOP Persemaian, nomor : SOP-TNM-002 tanggal 23 Oktober 2017 - SOP Pembangunan Tanaman, nomor : SOP-TNM-001 tanggal 16 Oktober 2017 - SOP Penanaman, nomor : SOP-TNM-003 Rev.01 tanggal 21 Juni 2019 - SOP Pemanenan, nomor : SOP-TBG-001 tanggal 08 November 2017. - SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, nomor : SPO-FPR-036 tanggal 16 Oktober 2017 Berdasarkan telaah diverifikasi bahwa SOP Tahapan Sistem Silikultur THPB dan TPTI tergabung menjadi satu. Dalam hal ini, SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Dapat diverifikasi terdapat keberadaan implementasi Tahapan Sistem Silvikultur THPB dengan kondisi : a. SOP Penataan Areal Kerja (PAK) Terdapat realisasi PAK di lapangan berupa pemberian Plang dan Batas Blok dan Petak. Terdapat penandaan petak yang masih belum sesuai misalnya SOP misalnya pemberian warna patok. b. SOP Risalah Hutan Risalah Hutan Tanaman belum tersedia karena belum terdapat rencana pemanenan kayu tanaman. Ketersediaan data potensi didapatkan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berdasarkan LHC pada areal LOA yang merupakan areal penyiapan lahan dengan memanfaatkan kayu hutan alam. c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Implementasi SOP Pembukaan Wilayah Hutan telah dilaksanakan berupa pembuatan jalan Utama dan Jalan cabang pada RKTUPHHK-HT Tahun 2018 sebesar 38,39 Km atau 68,50% dari rencana. Sementara rencana pada RKT Tahun 2019 tedapat rencana sepanjang 17,61 Km. Pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa kondisi jalan perlu perawatan. d. SOP Pengadaan Bibit Implementasi SOP Pengadaan bibit dapat diverifikasi keberadannya pada Persemaian. Luas Persemaian PT Swadaya Perkasa seluas 2 Ha. Dapat diverifikasi pembuatan bibit jenis Sengon, Kaliandra dan Pohon Buah. e. SOP Penyiapan Lahan Implementasi SOP penyiapan lahan dapat diverifikasi di lapangan, ditemukan penyiapan lahan dengan sistem rumpuk, namun belum teralisasi sesuai dengan target RKTUPHHK-HTI. f. SOP Penanaman Implementasi SOP Penanaman diverifikasi telah dilakukan. Dapat diverifikasi tanaman jenis Acasia Mangium. g. SOP Pemeliharaan Impementasi SOP Pemeliharaan dapat diverifikasi dilapangan yaitu kegiatan penebasan pada tegakan umur 1 Tahun h. SOP Pemanenan Pemanenan yang dilakukan merupakan pemanenan kayu alam untuk penyiapan lahan. Implementasi pemanenan hutan tanaman belum ada karena belum sampai daur. i. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Implemetasi SOP Perlindungan dan Pemangaman hutan belum optimal, namun dapat dijumpai adanya upaya berupa pembuatan Larangan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				membakar Hutan. Implementasi SOP TPTI belum dapat diverifikasi, karena belum terdapat kegiatan pada Blok Tanaman Unggulan baik RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Berdasarkan uji petik pengukuran potensi tanaman pokok dengan tahun tanam 2014 di petak TP.I.15 didapatkan potensi jenis *Acacia mangium* sebesar 120,17 m3/Ha (≥120 m3/Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Sedang	Berdasarkan uji petik tanaman muda didapatkan jumlah tanaman muda umur 1 tahun sebesar 77 % (>75-89%). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	PT Swadaya Perkasa memiliki prosedur pemanfafatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan diantaranya : - SOP Reduce Impact logging, nomor : SPO-PRN-009 tanggal 11 Oktober 2017. • SOP Micro Planning, nomor : SPO-PRN-010 tanggal 11 Oktober 2017
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Pada saat kegiatan penilikan Ke-1, belum terdapat penambahan kegiatan penerapan teknologi ramah lingkungan dimana dapat diverifikasi terdapat pelaksanaan pra perencanaan yaitu penggunaan teknologi *software ArcGIS* pembuatan peta kerja. Kegiatan *micro planning* belum dilaksanakan karena belum terdapat pemanenan hutan tanaman.
3.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan	CD	Baik	Perhitungan FE dilakukan pada areal LOA (hutan alam), berdasarkan laporan pengukuran faktor eksploitasi yang

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Minimal			dilakukan PT Swadaya Perkasa didapatkan nilai FE rata-rata dari 5 (lima) petak sample adalah sebesar 0,76 (>0,7). Sementara untuk perhitungan RWA dari hutan tanaman belum didapatkan karena belum ada pemanenan dari hutan tanaman.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(13/15) 100% = 86,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	Pada periode audit PHPL dapat diverifikasi keberadaan RKTUPHHK-HTI dengan kondisi sebagai berikut : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 63/Kpts/DK-II/2018 tanggal 5 Maret 2018. SK berakhir tanggal 4 Maret 2019. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. S22.110.1/40/Kpts/DK-ii/2019 tanggal 25 Februari 2019. SK Berlaku sampai dengan 24 Februari 2020. Dengan demikian, terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 100% (dari periode penilaian) yang disusun berdasarkan RKU.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Dapat diverifikasi keberadaan peta rencana kerja jangka panjang berupa Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 skala 1:50.000. Telah tergambar areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dengan kode romawi pada urutan Blok TP, TK dan TU. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Lereng>15%, Sempadan Sungai, BZ Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Lindung, KPPN, dan KPSL. Kesesuaian peta kerja jangka pendek dapat diverifikasi dimana lampiran peta RKTUPHHK-HTI skala 1:50.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam dan terdapat penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Lereng>15%, Sempadan Sungai, Bz Hutan Lindung, KPPN, dan KPSL.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Baik	Pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HTI RKT Tahun 2019 dapat diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan petak tebangan tanaman Pokok sesuai Peta. Secara sampling dilakukan pemeriksaan penandaan Kawasan Lindung yaitu Sempadan Sungai Damiunsung telah terdapat penandaan plang, namun belum terdapat pendanaan pada batas kiri dan kanan Sempadan Sungai.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat panen kayu hutan tanaman. Pada periode audit dapat diverifikasi panen kayu alam dengan kondisi : - Realisasi volume tebangan total RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 sebesar 10,42% (<70%) dari rencana tebangan tahunan. Realisasi luas tebangan total RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 sebesar 17,79% (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan tidak melebihi luas lokasi yang sesuai dengan RKT.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Buruk	Dapat diverifikasi keberadaan laporan Keuangan per 31 Desember 2018 PT Swadaya Perkasa yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai Laporan Auditor Independen No. 00394/2.1035/au.2/01/0749-2/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019. Berdasarkan Laporan Keuangan dapat dianalisis kondisi kesehatan finansial PT Swadaya Perkasa Tahun 2018 : - Likuiditas = 14,41 % (<100%) - Solvabilitas = 126,23 % (>100-150%) - Rentabilitas = Negatif - Opini = Wajar Tanpa Pengecualiasn Diketahui bahwa pada periode penilaian kondisi kesehatan finansial perusahaan belum seluruhnya memenuhi norma sedang maupun baik.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Baik	Berdasarkan realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan Tahun 2018 (perencanaan, perlindungan hutan, pembinaan hutan, pengadaan sarana dan peralatan kerja, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan SDM) telah terealisasi dana sebesar Rp. 509.888.000,- dari rencana Rp.10.369.234.000,- atau teralisasi 4,92 % (<59%) dari yang seharusnya.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan realisasi alokasi dana diketahui proporsi realisasi dana terdapat perbedaan sebesar 94,41% % (>50%). Realisasi terbesar pada Perencanaan Hutan yaitu 96,02 % dan realisasi terendah pada Pembinaan Hutan yaitu 1,61%.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kebutuhan operasional berdasarkan wawancara dengan Manager Site diketahui bahwa pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar. Wawancara dengan karyawan diketahui bahwa tidak pernah terdapat tunggakan gaji dan gaji dibayarkan sesuai waktunya.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Berdasarkan telaah dokumen dan lapangan diketahui masih terdapat kegiatan teknis belum sesuai tata waktunya terbukti dengan adanya *carry over*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya man power dan alat untuk penanaman.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Berdasarkan Neraca Tanaman terdapat realisasi tanam seluas 2.636,97 Ha atau 81,79 % dari kewajiban seharusnya. Diketahui bahwa sampai dengan saat dilakukan audit Penilikan Ke-1, terdapat Luas Penyiapan Lahan dari Hutan Alam Bekas Tebangan yang belum ditanam seluas 800,41 Ha dimana seluas 213,11 Ha berada pada Petak TP.VI.01, TP.VI.02, dan TP.VI.03 merupakan areal yang tidak dapat ditanam yaitu eks perkampungan lama dan terdapat kuburan didalamnya, sehingga kewajiban yang belum ditanam pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 seluas 587,3 Ha.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Buruk	Berdasarkan Neraca Tanaman dan rencana penanaman sesuai RKTUPHHK-HT didapatkan realisasi kegiatan fisik penanaman tanaman pokok Tahun 2018 sebesar 62,95 Ha dari rencana 6.031,08 ha atau terealisasi sebesar 01,04 % (<50% yang seharusnya).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/21) x 100% = 47,62 %
Nilai Kinerja Indikator				**BURUK (1)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	- AMDAL PT Swadaya Perkasa yang telah mendapat pengesahan Gubernur Kaltim No.660.1/K.237/ 2010 tgl 26 April 2010 - SK.52/VI-BUHT/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa tahun 2012 periode 2012-2021 - SK Dirut PT Swadaya Perkasa No. 001.a/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Swadaya Perkasa: luas kawasan lindung sebesar **2.154 ha**,

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terdiri dari luas Kelerengan >15% = 46 ha, Sempadan Sungai : 1.050 ha, BZ HL : 103ha, KPPN :465 ha, dan KPSL = 490ha. - Hasil identifikasi di lapangan, luas kawasan lindung sesuai dengan kondisi biofisiknya, tetapi dalam Peta RKUPHHK-HTI khusus untuk jenis kawasan lindung kelerengan >15% untuk tanah sangat peka erosi seluas 46 ha belum diplotkan letaknya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	- BA kegiatan penandaan batas sempadan Sungai Sunggalit Blok-II tanggal 12 Maret 2015 - BA kegiatan penandaan batas sempadan Sungai Dumaring Blok-I tanggal 6 Februari 2017 - BA kegiatan penandaan batas areal KPSL Blok-II tanggal 22 Maret 2017 - BA kegiatan penandaan batas areal KPPN Blok-II tanggal 2 Mei 2017 Berdasarkan verifikasi di lapangan ditemukan batas sempadan sungai Sunggalit dengan titik koordinat N 01^{0}18'36" dan E 118^{0}21'35" Kawasan lindung yang telah ditata batas dilapangan : 43,63/68,5 x 100% = **58,5 %**
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Sedang	Berdasarkan hasil perbandingan antara areal kawasan lindung yang ada dalam Peta RKUPHHK-HTI dan Peta Penutupan Lahan hasil penafsiran komposit citra satelit No.surat: 545/IPSDH/PSDH/ PLA.1 /11/2018 Tanggal 5-11-2018 maka dapat luas KL yang tidak berhutan seluas 558,5 ha tutupan berupa belukar tua. Total luasan atau persentase tutupan lahan kawasan lindung sebesar : 1.595,5 ha / 2.154 ha x 100 % = 74,07%
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	Berdasarkan dokumen RKUPHHK HTI (2012) dan wawancara dengan Bapak Pardede (Jabatan sebagai SPI), terdapat 5 (lima) desa binaan PT Swadaya Perkasa, yakni Desa Capuak, Dumaring, Batu Putih, Tembudan, dan Desa Lobang Kelatak. Sosialisasi Kawasan lindung baru dilaksanakan di Desa Batu Putih, yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 1 - 2019
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan	D	Baik	Laporan RKL dan RPL Semester I & II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 PT

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU			Swadaya Perkasa, Nomor Surat : - 059B/SP/BRU-I/2018, Tanggal 9 Juli 2018 - 059B/SP/BRU-II/2018, Tanggal 9 Januari 2019 - 0618/SP/bru-I/2019, Tanggal 2 Juli 2019 PT Swadaya Perkasa telah membuat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20/27) x 100% = 74,07 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	SOP Pengendalian kebakaran hutan (No. SOP-FPR-032, tanggal terbit 13 Nov 2017) belum mengacu ke Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terkait sarana-prasarana yang dibutuhkan, SDM dan kompetensi personil yang diperlukan, serta kegiatan-kegiatan minimal yang perlu dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Hampir semua SOP kriteria ekologi tidak mencantumkan referensi acuan yang digunakan.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Berdasarkan Daftar peralatan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan PT Swadaya Perkasa maka sarana damkarhutla PT Swadaya Perkasa belum sepenuhnya mengacu Peraturan Menteri LHK Nomor : P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	Semua personil Satpam/wakar maupun personil Dalkarhutla PT Swadaya Perkasa belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan damkar dan/atau sertifikat pelatihan satpam. PT Swadaya Perkasa telah membentuk regu pendukung dari personil kontraktor, dan juga telah membentuk struktur organisasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang meliputi regu perbantuan dari desa-desa sekitar (Desa Dumaring dan Desa Capuak), tetapi auditi belum bisa menunjukkan BA sosialisasi dan/atau pembentukan MPA di masing-masing desa tersebut.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	PT Swadaya Perkasa : - Telah menyediakan personil perlindungan hutan yakni personil damkar dan personil satpam/wakar - Terdapat plang tanda/informasi memasuki areal PT Swadaya Perkasa - Terdapat plang informasi/ himbauan/ larangan terkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran, perlindungan flora dan fauna) - Memantau cuaca melalui alat penakar curah hujan yang dipasang di sekitar Camp km 28 - Belum membentuk MPA PT Swadaya Perkasa telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan tetapi belum mencakup seluruh gangguan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	PT Swadaya Perkasa telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL (2010). SOP yang belum ada sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain: (a) SOP terkait pemantauan sedimen, (b) SOP terkait pemantauan kualitas air, (c) SOP terkait pemantauan biota perairan (benthos dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				plankton), (d) SOP terkait pemantauan kualitas udara ambient, dan (e) SOP terkait pemantauan kebisingan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT Swadaya Perkasa telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. Sarana yang belum ada dan/atau yang masih kurang, antara lain (a) belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, dan (b) belum memiliki sarana pemantauan kebisingan, dan (c) belum memiliki sarana pemantauan biota perairan (bhentos dan plankton)
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	Berdasarkan data dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan PT Swadaya Perkasa Indah, bahwa PT Swadaya Perkasa telah memiliki 1 (satu) orang Ganis-PHPL Binhut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, yaitu Bapak Mulyadi. (No. Register 01390-11/BINHUT/XX/2018, dengan masa berlaku sampai tanggal 8 Januari 2021) Berdasarkan ketersediaan SDM Ganis PHPL Binhut dan berdasarkan peraturan yang ada, maka persentase SDM pengelolaan dan pemantauan dampak teradap terhadap tanah dan air di Swadaya Perkasa yaitu 100%.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	Berdasarkan verifikasi di lapangan, KSU Meranti Tumbuh Indah telah membuat persemaian pada camp Km 28 pada koordinat N-01°23'17" dan E-118°9'25", dengan jenis tanaman yaitu Sengon : 26.549 bibit dan Kaliandra 9.240 bibit serta Benggeris : 1.594 bibit, dan Durian : 767 bibit, total 38.150 bibit. Persemaian tersebut telah dibangun dengan kuantitas bedengan sebanyak 40 (empat puluh) buah bedengan. Setiap bedengan mampu menampung polybag sebanyak 1000 polybag, sehingga bisa menampung sebanyak 40.000 bibit.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Tersedia Laporan pelaksanaan RKL-RPL selama periode setahun terakhir, dan juga tersedia bukti tanda terima penyerahan laporan dari instansi terkait Tersedia hasil analisis uji air sungai dan tanah dari Laboratorium ProLing, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan IPB - Bogor, dengan surat hasil uji No : P.182/V/2019, perihal Laporan Hasil Analisis

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Laboratorium,tanggal 5 Juni 2018
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Hasil identifikasi lapangan menunjukkan adanya bak erosi di Km 29 pada posisi koordinat N-01°22'39" dan E-118°9'47" ukuran bak erosi 14 m x 2 m, terdapat juga water stick atau alat pengukur tinggi air di Sungai Dumaring pada posisi koordinat N-01°23'6" dan E-118°9'22". Alat pengukur curah hujan (Ombrometer) di Persemaian pada posisi koordinat N-01°23'3" dan E-118°9'22". Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Baik	Berdasarkan dokumen SOP terkait identifikasi flora yang ada sudah memuat rincian proses dan langkah untuk identifikasi masing-masing jenis fauna seperti mamalia, burung, reptil, ampibi dan ikan, atau masing-masing jenis flora seperti jenis pohon, climber, epifit, paku-pakuan, perdu, semak, dll. SOP ini sudah mengacu secara eksplisit terhadap PP 7/1999, IUCN redlist, dan Appendix CITES.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	PT Swadaya Perkasa sudah melaksanakan identifikasi flora dan fauna dengan laporan yang sudah dirinci berdasarkan : 1. Status kelangkaannya (langka, jarang, terancam punah, endemik), 2. Status perlindungannya (menurut PP

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				7/1999), 3. Tingkat kerawanannya (menurut IUCN Red List), 4. Aturan perdagangannya (menurut Appendix CITES)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/12) x 100 % = 100 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Sedang	Berdasarkan prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dimiliki oleh PT Swadaya Perkasa maka terdapat prosedur pengelolaan flora berbentuk prosedur identifikasi, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- Hasil verifikasi di lapangan, PT Swadaya Perkasa telah membuat persemaian di Camp Km 28 pada koordinat N-01°23'17" dan E-118°9'25", dengan jenis tanaman yaitu Sengon : 26.549 bibit dan Kaliandra 9.240 bibit serta Benggeris : 1.594 bibit, dan Durian : 767 bibit, total 38.150 bibit. Persemaian tersebut telah dibangun dengan kuantitas bedengan sebanyak 40 (empat puluh) buah bedengan. Setiap bedengan mampu menampung polybag sebanyak 1000 polybag, sehingga bisa menampung sebanyak 40.000 bibit. Telah melaksanakan penanaman di Blok RKT 2018 seluas 38,8 ha, jarak tanam 3 m x 3 m, total penanaman seluas 4,76 ha dengan jumlah bibit sebanyak 40.000 bibit Memasang plang/papan larangan menebang / perlindungan terhadap jenis flora dilindungi, seperti di pada koordinat N-01°16'53" & E-118°22'9"

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Berdasarkan hasil observasi lapangan, baik di blok-I maupun di blok-II, ditemukan adanya tanda-tanda telah terjadinya kegiatan penebangan liar, dan berdasarkan sisa-sisa kayu yang ada di lokasi titik temuan, jenis-jenis yang teridentifikasi sebagai sasara kegiatan penebangan liar adalah jenis meranti dan jenis ulin. Jenis ulin adalah jenis yang termasuk dilindungi oleh peraturan yang berlaku secara nasional, maupun konvensi internasional
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(12/18) x 100 % = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Sedang	PT. Swadaya Perkasa telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi semua SOP masih bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan fauna dilindungi yang akan dilakukan belum sepenuhnya berbasis pada jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi fauna dilindungi
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	PT Swadaya Perkasa telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan fauna, berupa KPSL seluas 490 ha dan/atau areal kawasan lindung lainnya, sebagaimana sudah dibahas dalam verifier 3.1.1. Sebagian areal ini telah ditatabatas dan ditandai di lapangan sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.2 Pemegang izin melakukan kegiatan pengelolaan fauna melalui kegiatan sosialisasi tidak langsung berupa pemasangan spanduk dan/atau papan informasi/banner/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi, maupun sosialisasi langsung di kampung

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Berdasarkan data hasil indentifikasi fauna dilindungi, di wilayah ini ditemukan beberapa satwa dilindungi, salah satunya adalah Owa kalawat (*Hylobates muelleri*). Berdasarkan pustaka yang ada, jenis ini merupakan jenis arboreal dan kurang dapat beradaptasi dengan ekosistem buatan seperti HTI dan membutuhkan ekosistem hutan alam dengan keanekaragaman tegakan pohon yang tinggi serta kesinambungan kanopi pohonnya untuk pergerakan dan mencari pakannya.)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT SWP, data dan dokumen yang tersedia **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT SWP dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode 2012 – 2021, RKTUPHHK–HT tahun 2018 dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Semester II tahun 2018 & Semester I Tahun 2019, namun belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	Sedang	PT SWP memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SPO Tata Batas Partisipatif, SPO Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat dan SPO Penyelesaian Konflik, akan tetapi SPO tersebut baru **sebagian** diimplementasikan di lapangan dalam penataan batas desa dan Ulayat, dan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terdapat bukti sebagian laporan/dokumen terkait pemetaan partisipatif tersebut.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT SWP memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SPO Identifikasi Hak-hak Masyarakat, SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SPO Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat, SPO Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur, SPO Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung dan SPO Pelaksanaan FPIC.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Sedang	Areal PT SWP terbagi dalam 2 Blok, Blok I berada di wilayah ulayat Desa Dumaring dan Cepuak Kec. Talisayan sedang Blok II masuk wilayah ulayat desa Tembudan, Batu Putih dan Lobang Kelatak Kecamatan Batu Putih. PT SWP telah melakukan Penataan Batas Partisipatif Ulayat di Blok II yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Pembuatan Batas Partisipatif Ulayat di Blok II PT SWP, Penataan batas ini terkait dengan pembagian Fee kompensasi kayu. Hasil observasi lapangan di areal PT SWP Blok II sepanjang kiri kanan jalan menuju Perkebunan PT Jabontara ditemukan beberapa Pemukiman/pondok, Rumah Walet, Kebun Sawit dan kegiatan perladangan oleh masyarakat Batu Putih dan sekitarnya, terhadap areal tersebut PT SWP telah melakukan pendataan yang dituangkan dalam Berita Acara Penguasaan Lahan oleh Masyarakat desa Batu Putih di areal Konsesi PT SWP Blok II arah Jalan PT Jabontara, namun belum dilakukan penataan batasnya terhadap areal tersebut. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Batu putih diperoleh informasi bahwa kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat di areal PT SWP Blok II telah berlangsung sebelum izin PT SWP terbit. PT SWP memiliki **sebagian** bukti – bukti terkait luas dan batas kawasan areal perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Baik	Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2019), PT SWP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Daerah) ini dibuktikan dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode 2012 - 2021 serta RKTUPHHK-HTI PT SWP tahun 2018 dan 2019, serta terdapat bukti Kesepakatan dan Kerjasama dengan masyarakat sekitar areal. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar areal, diperoleh informasi bahwa masyarakat mendukung terhadap kegiatan operasional PT SWP. Pada areal PT SWP terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, namun konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/30) 100% = 80,00%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Sedang	PT SWP memiliki **sebagian dokumen** terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HT PT SWP, RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK-HT Tahun 2018 & 2019, Rencana Kelola Sosial PT SWP Semester II Tahun 2018 dan Semester 1 tahun 2019 (namun kegiatannya tidak dirinci pada masing-masing desa binaan), Realisasi Kelola Sosial Semester II Tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 (laporan yang ada tidak lengkap lengkap).
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Sedang	PT. SWP memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SPO PMDH, SPO Distribusi Manfaat, SPO Pemberian Dana kompensasi dan SPO Pola Kemitraan, akan tetapi tidak tersedia mekanisme yang mengatur Perjanjian dengan masyarakat padahal dalam prakteknya sudah dilakukan oleh perusahaan.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 PT SWP memiliki bukti sebagian terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT SWP terhadap masyarakat sekitar, terdapat Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKT 2019 PT SWP kepada masyarakat Desa Cepuak dan Dumaring pada tanggal 15 Maret 2019, akan tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Kampung Dumaring, Cepuak dan Tembudan, diperoleh informasi bahwa PT SWP telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat namun tidak dilakukan secara rutin (tiap tahun). PT SWP memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	PT SWP memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal tertuang dalam Realisasi Kelola Sosial Smt II Tahun 2018 dan Smt I Tahun 2019, Bantuan yang sifatnya Insidentil (HUT dan Keagamaan) serta Pembayaran Fee Kompensasi Produksi Kayu dan Fee Pemakaian Jalan kampung & Logpond.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT SWP memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Realisasi Kegiatan Sosial PT SWP, BA Serah Terima bantuan PT SWP (namun tidak lengkap), BAST Pembayaran Fee Kompensasi dan Fee Pemakaian Jalan & Log Pond.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/30) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><th>No.</th><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT SWP meliputi :
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. Data Masyarakat yang terlibat :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Tenaga Kerja</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Kontraktor dan atau Borongan</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Data masyarakat yang tergantung :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td><td>Tidak Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM</td><td>Tersedia sebagian</td></tr>
<tr><td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia sebagian</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia sebagian</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>4.3.2.
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT. SWP memiliki mekanisme legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SPO Dampak Sosial Pengelolaan Hutan, SOP Distribusi Manfaat, Pemberian Dana Kompensasi, SOP Pemanfaatan HHNK dan Infra Struktur, SPO Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung dan SOP Pola Kemitraan.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>4.3.3.
Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diketahui bahwa PT SWP memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, namun tidak lengkap dan tidak sinkron antara rencana jangka panjang dalam RKUPHHK dengan rencana jangka pendek yang ada dalam RKTUPHHK maupun Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>4.3.4.
Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT SWP terhadap masyarakat sekitar :
1. Dalam Realisasi Kegiatan Kelola Sosial</td></tr>
</table>

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran			PT SWP Smt II Tahun 2018 dan Smt I Tahun 2019, sebesar 0 % (Kegiatannya honor dan Pembayaran Fee Kompensasi saja) 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata sebesar 30,53 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal, sebesar 66,67 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan sebesar 0 % Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SWP sebesar : (0 + 30,53 + 66,67 + 0) % : 4 = **24,30 %** **(<50 %)**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Sedan	Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT. SWP memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), namun tidak lengkap lengkap dan kurang jelas.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(22/30) 100% = 73,33%
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG (2)**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT SWP memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang dalam SPO Penyelesaian Konflik, SPO Pemetaan Konflik Sosial dan SPO Penanganan Klaim. Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT SWP dan wakil masyarakat, selama ini PT SWP dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan di camp (dalam hal ini Site Manager) selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat sekitar dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Baik	Pada Peta Sebaran Desa PT SWP skala 1 : 200.000, kampung/desa yang berada di sekitar areal PT SWP ada 5 kampung yaitu di

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Blok I Kampung Dumaring dan Cepuak Kec. Talisayan sedangkan di Blok II Kampung Tembudan, Batu Putih dan Lobang Kelatak Kec. Batu Putih. Berdasar Berita Acara Hasil Kegiatan Pendataan Penguasaan Lahan oleh Masyarakat desa Batu Putih di areal Konsesi Blok II Jalan ke arah PT Jabontara oleh PT Swadaya Perkasa pada bulan Januari dan Februari tahun 2017, diperoleh hasil bahwa pada areal PT SWP di Blok II terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat Batu Putih dan sekitarnya terdapat 86 klaim/pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan luas total 188 Ha. Hasil wawancara dengan Aparat Pemerintah Desa Batu Putih diperoleh informasi bahwa kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah berlangsung sejak lama sebelum izin UPHHK_HT PT SWP terbit . Pada periode Penilikan ke-1, PT SWP telah menyusun Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 sesuai **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	PT SWP memiliki organisasi dan SDM yang bertanggungjawab terhadap penanganan konflik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan Job Desc. yang sesuai dengan struktur tersebut, serta PT SWP telah menyusun anggaran untuk Resolusi Konflik namun masih digabung dengan anggaran Kelola Sosial lainnya. Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial apabila terjadi konflik di lapangan mekanismenya adalah Asisten PMDH dan Askep Forets Protection melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kasus tersebut bersama tokoh masyarakat dan apabila belum terselesaikan maka Manager Operasional sebagai pimpinan tertinggi di camp untuk menyelesaikan konflik tersebut.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	PT SWP memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi serta telah membuat laporan Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik yang

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dibuat setiap semester yang mengacu **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK, namun tidak tersedia laporan resolusi konflik sesuai dengan pasal 4 Perdirjen P.5 Tahun 2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/24) 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	PT SWP telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan adanya sarana hubungan industrial yang meliputi : Tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) PT SWP Periode Tahun 2018-2020 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau dengan No. KEP.560/941.4.KSK Tanggal 13 Desember 2018 (masa berlaku 2 tahun), akan tetapi belum dilakukan sosialisasi kepada Karyawannya (bukti sosialisasi tidak tersedia). Manajemen PT SWP memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat dan dibuktikan adanya Surat Pernyataan Direktur No. 001.d/SP-HTI/JKT/II/2007 tanggal 08 Februari 2017 tentang mengijinkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Implementasi hubungan industrial oleh PT SWP dibuktikan dengan adanya SPK Karyawan serta Upah Karyawan terendah diatas UMK Kab. Berau Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT SWP, diperoleh informasi bahwa sebagian besar karyawan belum mengetahui dan memahami isi dari Peraturan Perusahan PT SWP periode tahun 2018 – 2020, serta Perusahaan telah merealisasikan sebagian besar klausul yang

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Baik	PT SWP telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP dan telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan/Pelatihan Ganis Tahun 2018 sebesar **100 %**. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SWP memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut = 2, Binhut = 1 dan PKB-R = 2 (kartu SIM masih berlaku) dan telah memenuhiketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT SWP memiliki sebagian dokumen terkait Standart Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT SWP Periode 2018 – 2020, Bab IV Pasal 11 - 13, namun baru sebagian diimplementasikan. Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan karyawan PT SWP diperoleh informasi bahwa PT SWP baru mengimplementasikan sebagian terkait standar jenjang karir kepada karyawannya serta Penilaian Prestasi Kerja dan Promosi Karyawan belum berjalan sesuai mekanisme yang ada.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	PT SWP memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Bab VII – Bab VIII Pasal 25 – 38 dan PT SWP baru mengimplementasikan. sebagian Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan karyawan PT SWP, diperoleh informasi bahwa PT SWP baru mengimplementasikan sebagian terkait tunjangan kesejahteraan karyawannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-Re dan Hak Pengelolaan
Indikator 1.1.1 : Pemengang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelolan IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) PT Swadaya Perkasa dapat dibuktikan dengan SK. IUPHHK-HT SK. Menteri Kehutanan No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa skala 1:50.000 seluas ± 17.925 Hektar. Pada lamppiran peta terdapat Cap dan tanda tangan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan Sedangkan untuk legalitas dokumen lain terkait dengan keberadaan PT Swadaya Perkasa sebagai berikut: 1. Akte Notaris Pendirian Perusahaan No. 01, tanggal 10 April 2001 dari Notaris Lenny Harlina, SH 2. Akte Notaris Perubahan terakhir No. 128 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Wiwik Condro, S.H. ; Berdasarkan Akta nomer 128 tersebut Susunan Pengurus Perusahaan sebagai berikut : a. Komisaris : Ieneke Santoso b. Direktur : Eddy Sanusi 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Swadaya Perkasa Nomor 9120104781363 tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS sbb. : • Nama Perusahaan : PT Swadaya Perkasa • Alamat Perusahaan : Wisma Indocement lantai 12, Jl Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Keluarahan Setiabudi Kota Administratif Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. • NPWP : 02.031.667.5-211.000 • Nomor Telepon : - • Nomor Fax : - • Email : bdataran1@gmail.com • Nama KBLI : Pengusahaan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sengon/ Albasia/ Jeunjing, Pengusahaan hutan Akasia, Pengusahaan Hutan Alam • Kode KBLI : 02115, 02117, 02120 • Status Modal : PMDN NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	- Dokumen Surat Perintah Pembayaran SPP No. S.1049/VI-BIKPP/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang diujukan kepada PT Swadaya Perkasa atas tagihan IIUPHHK sebesar Rp. 46.605.000,00 - Bukti setor slip pembayaran melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 46.605.000,00 tanggal 23 Desember 2011
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Sesuai hasil overlapping Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa (Lampiran SK IUPHHK-HT No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011) dengan Peta Areal Kerja Perkebunan PT Jabontara Eka Karsa (Lampiran Peta SK. Menteri Kehutanan Nomor : 643/Kpts-II/95) maka diketahui bahwa terdapat lokasi tumpang tindih antara areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT jabontara Eka Karsa seluas ± 400 Ha. Namun demikian berdasarkan hasil pengukuran batas dan realisasi tata batas temu gelang PT Swadaya Perkasa diketahui bahwa pada lokasi overlapping tersebut terdapat areal yang dikeluarkan karena sudah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 182,79 Ha. Dengan demikian masih terdapat overlapping areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dengan Perkebunan kelapa sawit PT Jabontara Eka Karsa yang masuk ke kawasan hutan di Blok II dari PT Swadaya Perkasa seluas ± 217,21 Ha

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh	**M**	Hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan ke-1 diketahui bahwa dokumen perencanaan jangka Panjang dan jangka pendek yang dimiliki oleh PT Swadaya Perkasa sebagai berikut:

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		1. RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012-2021 yang telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. 2. RKT UPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. SK.63/Kpts/DK-II/2018 tanggal 05 Maret 2018. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKT UPHHK-HTI skala 1:50.000 dengan masa berlaku dari tanggal 05 Maret 2018 s.d. tanggal 04 Maret 2019 3. RKT UPHHK-HTI Tahun 2019 telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. SK.522.110.1/40/Kpts/DK-II/2019 tgl. 25 Februari 2019. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKT UPHHK-HTI skala 1:50.000 dengan masa berlaku dari tanggal 25 Februari 2019 s.d. tanggal 24 Februari 2020 4. Terdapat Personil Ganis PHPL Canhut atas nama Novita Ariani Sitorus, S.Hut No. Reg. 02160-13/CANHUT/XX/2016 berlaku sampai dengan 19 Desember 2019 sesuai dengan SK.939/BP2HP.XI-3/2016 yang ditunjuk oleh Manajemen PT Swadaya Perkasa untuk melaksanakan tugas sebagai Ganis PHPL Canhut PT Swadaya Perkasa
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT. Swadaya Perkasa memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan RKT 2019 skala 1:50.000 yang memuat areal tidak boleh ditebang/ kawasan lindung. Areal yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung pada Peta RKT ditandai dengan arsiran jelas berupa Kawasan Lindung seluas 2.154 Ha terdiri dari : a. Lereng > 15 % seluas 46 Ha b. Sempadan Sungai seluas 1.050 Ha c. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 103 Ha d. KPPN seluas 465 Ha e. KPSL seluas 490 Ha Verifikasi lapangan dijumpai adanya penandaan/ pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh ditebang berupa : a. Sempadan Sugai Damiunsung/ Dumaring, terdapat arsiran di peta RKT 2018 dan RKT 2019, dan terbukti keberadaannya di lapangan pada koordinat N 01° 23’ 07,8” dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			E 118° 09' 22,1". b. Sempadan Sugai Sunggalit, terdapat arsiran di peta RKT 2018 dan RKT 2019, dan terbukti keberadaannya di lapangan pada koordinat N 01° 18' 36,8" dan E 118° 21' 36,1". c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), terdapat arsiran di peta RKT 2018 dan RKT 2019, dan posisinya terbukti keberadaannya di lapangan pada koordinat N 01° 19' 59,4" dan E 118° 23' 24,9" d. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), terdapat pewarnaan di peta RKT 2018 dan RKT 2019, sedangkan posisinya terbukti keberadaannya di lapangan pada koordinat N 01° 16' 54,0" dan E 118° 22' 09,0".
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran dokumen RKTUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa tahun 2018 dan tahun 2019 dengan skala peta 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diketahui terdapat penandaan lokasi Blok tebangan/Blok RKT dan petak/kompartemen. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : ➢ Batas Blok RKT 2019 pada koordinat N 01^0 24' 52,3" dan E 118^0 10' 55,2" terdapat plang RKT dan batas dari cat warna Merah ➢ Batas Petak 04 dan Petak 05 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 24' 24,5" dan E 118^0 10' 32,7" terdapat patok batas dari kayu keras dicat warna putih dengan tulisan warna hitam. ➢ Batas Petak 06 dan Petak 11 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 23' 57,9" dan E 118^0 09' 59,9" terdapat patok batas dari kayu keras dicat warna putih dengan tulisan warna hitam. ➢ Batas Petak 15 dan Petak 16 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 23' 10,1" dan E 118^0 09' 22,8" terdapat patok batas dari kayu keras dicat warna putih dengan tulisan warna hitam. ➢ Batas persimpangan 4 petak yaitu Petak 15; Petak 16; Petak 10 dan Petak 9 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 23' 09,9" dan E 118^0 09' 27,6" tidak ditemukan patok, namun terapat cat warna merah pada pohon sepanjang jalur pada empat arah dan dilengkapi dengan penandaan pita plastik/ ribbon warna orange sepanjang jalur batas petak.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012-2021 yang telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. Dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa yang telah disahkan diketahui bahwa dari luas areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa 17.925 Ha direncanakan sebagai berikut : 1. Kawasan Lindung seluas 2.154 Ha terdiri dari: a. Lereng > 15 % seluas 46 Ha b. Sempadan Sungai seluas 1.050 Ha c. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 103 Ha d. KPPN seluas 465 Ha e. KPSL seluas 490 Ha 2. Areal tidak efektif (Sarana dan Prasarana) seluas 800 Ha 3. Areal efektif seluas 14.971 Ha terdiri dari : a. Tanaman Kehidupan seluas 899 Ha b. Tanaman Pokok seluas 12.103 Ha c. Tanaman Unggulan seluas 1.969 Ha.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	Target luas dan volume pemanfaatan kayu RKT Tahun 2018 adalah : • luas 4.499,53 Ha • volume 150.954,71 M3 dengan rincian volume KB 71.516,77 M3, volume KBS 48.737,60 M3 dan volume KBS 30.700,34 M3 Target luas dan volume pemanfaatan kayu RKT Tahun 2018 dengan target : • Luas penyiapan lahan 5.922,57 Ha • Volume 135.221,64 M3 dengan rincian volume KBB 60.201,93 M3, volume KBS 45.020,20 M3 dan volume KBS 29.999,51 M3 Berdasarkan uji petik lokasi penyiapan lahan diverifikasi bahwa terdapat kesesuaian lokasi penyiapan lahan antara rencana berdasarkan dokumen RKT dan di lapangan, diantaranya : - Petak TP.IV.5 RKT 2018 pada koodinat 1°24’20,28’’N dan 118°10’28,29’’E sesuai lokasi. - Petak TP.IV.6 RKT 2018 pada koodinat 1°23’52,17’’N dan 118°10’5,25’’E sesuai

			lokasi. Realisasi pemanfaatan kayu pada RKT 2018 sebagai berikut : - Luas areal pemanfaatan kayu 800,41 Ha atau 17,79 % dari target seluas 4.499,53 Ha - Volume Produksi Kayu : • KBB 11.314,84 M3 atau 15,82% dari target sebesar 71.516,77 M3 • KBS 3.717,40 M3 atau 7,63% dari target sebesar 48.737,60 M3 • KBK 700,83 M3 atau 2,28% dari target sebesar 30.700,34 M3 - Realisasi penyiapan lahan seluas 108,51 Ha atau 1,80% dari target seluas 6.031,08 Ha - Sedangkan realisasi penanaman seluas 19,70 Ha atau 0,3% dari target seluas 6.031,08 Ha Untuk RKT 2019 masih belum terdapat operasional penebangan dan pemanfaatan kayu pada areal RKT 2019 dan pada RKT 208 sebelumnya diketahui bahwa pada periode audit terdapat realisasi pemanfaatan kayu hutan alam pada lokasi yang sesuai dan volume tidak melebihi target yang telah disahkan dan disetujui.

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Tersedia dokumen dan masih berlaku pada saat menerbitkan LHP atas nama Doddy Rinata Reg. 01371-11/PKB-R/XX/2013 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 12/02/2020. Tersedia copy dokumen dan telah terupload di website SIPUHH Online SK Nomor 016/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 berlaku sampai dengan 12/02/2020 sebagai penerbit LHP dan SK No. 019/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 untuk operator SIPUHH Online PT SWP. Selama periode audit bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 PT Swadaya Perkasa telah membuat/ menerbitkan LHP dari SIPUHH Online yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2018 sebanyak 2.815 Batang volume 8.916,38 M3 Terdapat dokumen LMKB pada TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb : 1. Stok Awal 01 Agustus 2018 = 9.017 Btg, 22.726,79 M3 2. Penambahan (LHP) = 2.815 Btg, 8.916,38 M3

			3. Pengurangan (SKSHHK, DKDS) = 7.659 Btg, 22.000,55 M3 4. Stok Akhir 31 Juli 2019 = 4.173 Btg, 9.642,62 M3 ➢ Di TPK Hutan = 2.649 Btg, 5.115,10 M3 ➢ Di TPK Antara = 1.524 Btg, 4.527,52 M3 Uji petik pengukuran stok kayu di TPK Antara pada koordinat N 01° 34' 51,3'' dan E 118° 12' 05,0'' dengan jumlah sample sebanyak 153 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,13 %. Dan nomor batang kayu di TPK Antara dapat diketahui di LHP sebagai berikut : - Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…013470 No. produksi 14597 LHP No. 07/LHP-KBB/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018 - Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…013282 No. produksi 14994 LHP No. 07/LHP-KBS/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018 - Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…013403 No. produksi 14082 LHP No. 07/LHP-KBB/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018 - Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…013287 No. produksi 14960 LHP No. 07/LHP-KBS/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018 - Kayu Barcode No. 1904A34SWDP0…011748 No. produksi 13889 LHP No. 07/LHP-KBB/SP/IX/2018 tanggal 06/09/2018

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Alur proses pengangkutan kayu PT Swadaya Perkasa dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan selanjutnya diangkut menuju Industri Kayu. Selama periode audit, PT Swadaya Perkasa telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: 1. Dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point menggunakan Logging Truck sebanyak 275 Set sejumlah 5.032 Batang dengan Volume 14.403,72 M^3. 2. Dari TPK Antara/ Loading Point menuju ke Industri mengunakan Logging Truck dan/ atau tongkang dan tug boat sejumlah 34 Set Dokumen sebanyak 7.421 Batang dengan Volume 21.850,48 M^3. SKSHHK diterbitkan melalui SIPUHH Online dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Penerbit SKSHHK :

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Mohammad Ibang Arif untuk SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Reg. 01900-11/PKB-R/XX/2016 dan SK Direksi PT SWP No SK.018/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 MAret 2019 berlaku s.d 17/03/2022 - Surya Martadinata untuk SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Reg. 01886-11/PKB-R/XX/2016 dan SK Direksi PT SWP No SK.017/SP-HTI/JKT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 berlaku s.d 17/03/2022

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT Swadaya Perkasa merupakan IUPHHK-HTI
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Swadaya Perkasa merupakan IUPHHK-HTI

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Selama periode audit, PT Swadaya Perkasa telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Loading Point sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point menggunakan Logging Truck sebanyak 275 Set sejumlah 5.032 Batang dengan Volume 14.403,72 M^3. Sedangkan penerbitan SKSHHK menuju industri kayu Dari TPK Antara/ Loading Point mengunakan Logging Truck dan/ atau tongkang dan tug boat sejumlah 34 Set Dokumen sebanyak 7.421 Batang dengan Volume 21.850,48 M^3.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 132.217,28 - PSDH sebesar Rp 623.167.400,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer via rekening Bank Mandiri sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan dan kode billing serta NTPN senilai total : - DR sebesar US$ 132.217,28 - PSDH sebesar Rp 623.167.400,00 Pembayaran PSDH dan DR PT Swadaya Perkasa telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan.
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Kesesuaian tarif yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 dan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT Swadaya Perkasa perihal keberadaan dokumen pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah terdapat lembar surat pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) atas nama PT Swadaya Perkasa. Bahwa PT Swadaya Perkasa telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor 04.01.1.03542 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 126/SIPT/PKAPT/07/2018 tgl. 05 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Sarana Distribusi dan logistik a.n. Menteri Menteri Perdagangan yaitu

			Sihard Hadjopan Pohan. Dokumen PKAPT PT Swadaya Perkasa masih berlaku sampai dengan 05 Juli 2023 Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Swadaya Perkasa tidak perlu memperpanjang izin PKAPT.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	PT Swadaya Perkasa selama periode penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali sebanyak 7 (tujuh) kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat berbendera Indonesia. Tersedia dokumen SPB untuk 7 (tujuh) alat angkut sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Swadaya Perkasa telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana operasional SIPUHH di Basecamp PT SWP. Di samping itu PT SWP memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Sertifikat PHPL Nomor 028.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT SWP berpredikat SEDANG dan berlaku dari tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan “028.SPHPL.019-IDN.”

PRINSIP 4 : **Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**
Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL terdiri atas Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Tim Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Timur dan telah disahkan melalui SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2010 tanggal 26 April 2010. Studi lingkungan telah mencakup seluruh areal kerja PT Swadaya Perkasa dengan luas studi seluas ± 24.850 Ha sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.S.429/MENHUT-VI/2009 29 Mei 2009 dan proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada periode audit yaitu : a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester I Tahun 2018 b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II Tahun 2018 Laporan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan kepada Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kab. Berau tanggal 12/07/2018 dan 10/01/2019 Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting sesuai dengan dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL seperti pemeriksaan sample kualitas air, pengukuran curah hujan, penataan kawasan lindung, Sempadan sungai, serta pemantauan kerawanan kebakaran dan lainnya

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat SOP tentang K3 PT Swadaya Perkasa sebagai berikut: - SOP Penanganan Darurat No. SPO-PRN-027 - SOP Penanganan Kecelakaan No. SPO-PRN-028 - SOP Pemulihan Keadaan Darurat No. SPO-PRN-029 - SOP Konsultasi dan Komunikasi K3 No. SPO-PRN-031 Terdapat Personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas K3 dibuktikan dengan adanya penunjukan melalui SK. Direktur No. 016a/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019. Struktur Organisasi K3 PT SWP : 1. Penanggungjawab Program K3 : Yudhi Dwi Cahyono 2. Koordinator Program K3 : Syarifuddin 3. Perencanaan/ Pengawas K3 : Mulyadi 4. Koordinator Lapangan : Ikhdiman 5. Logistik dan Peralatan : Kamal Ghazali
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Swadaya Perkasa, yaitu berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan jenis resiko pekerjaan (Helm, Sarung tangan, Sepatu, masker, kacamata dll) Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp Batu Kalong PT SWP dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik, namun jumlahnya masih perlu ditambah.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT. Swadaya Perkasa diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat setiap bulan. Laporan dibuat oleh Mulyadi selaku perencanaan dan pengawas K3 dan diperiksa oleh Ikhdiman selaku Koordinator Lapangan Program K3 serta diketahui oleh Sutono selaku Manager operasional. Selama periode audit, bulan Agustus 2018 – Juli 2019 tercatat bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja di wilayah kerja PT Swadaya Perkasa atau Catatan Kecelakan Kerja NIHIL Hasil interview dengan MR Bp Sutono menjelaskan bahwa tidak terdapat perawatan pekerja akibat kecelakaan dan pelayanan obat-obatan diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dirujuk ke Puskesmas di

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			talisayan atau dirujuk ke rumah sakit di Berau. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT Swadaya Perkasa tidak/ belum memiliki Serikat pekerja, namun PT SWP telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berorganisasi (berserikat/ berkumpul bagi karyawan). Secara tertulis hal tersebut tercantum dalam dokumen kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melaluai Surat Pernyataan Direktur No. 001.d/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 08 Februari 2017.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Swadaya Perkasa memiliki Peraturan Perusahaan periode 2018-2020 yang mengatur hak dan kewajiban karyawan. PP PT Swadaya Perkasa telah mendapatkan Pengesahan melalui SK Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Berau H. Zulkifli Azhari, SH NIP 19700902 199603 1 001 SK No. KEP.560/941.4.KSK tanggal 13 Desember 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Swadaya Perkasa. PP yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan dan mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Hasil verifikasi dilapangan atas daftar karyawan PT Swadaya Perkasa di basecamp atas posisi tenaga kerja terakhir, diketahui bahwa PT Swadaya Perkasa tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur atau tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Dari dokumen laporan tenaga kerja periode bulan Juli 2019 diketahui bahwa PT SWP memiliki 61 Karyawan di lapangan baik karyawan bulanan maupun karyawan harian yang rata-rata sudah berumur di atas 20 tahun.

			Karyawan termuda bernama ***Maryo Orlando Damara Kangki*** sebagai pekerja di bagian logistik yang lahir di Minanga Sulawesi Utara tanggal 13 Oktober 2000 dan saat ini berusia 18 tahun 9 bulan.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SWADAYA PERKASA

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	49	66
NILAI KINERJA AKHIR			74,24 %	**SEDANG** tanpa verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK.

Samarinda, 15 Agustus 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Imam Irwanto
Plh. Direktur